

Sosialisasi Pemahaman Inklusi Sosial Bagi Guru di SMA Negeri 1 Majene

Najamuddin Najamuddin^{1*}, Sopian Tamrin², Bahri Bahri³, Abd. Rahman⁴,
Hasruddin Hasruddin⁵

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar

*Corresponding author, e-mail: najamuddin@unm.ac.id.

Abstrak

Sekolah sebagai ruang pendidikan formal belum menjamin realisasi inklusifitas. Begitu juga yang terjadi pada SMA Negeri 1 Kabupaten Majene. Kondisi tersebut terkonfirmasi saat kegiatan observasi lapangan. Selain mencermati secara seksama keadaan lapangan juga dilakukan wawancara pada kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan serta beberapa siswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru terkait isu inklusi sosial. Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2023 di SMA Negeri 1 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Puluhan guru dari berbagai latar belakang disiplin ilmu mengikuti kegiatan ini. Pengabdian ini direncanakan, kemudian dilaksanakan serta di evaluasi. Peningkatan pemahaman inklusi dilakukan dengan metode sosialisasi dengan model dua arah. Adapun materi yang diturunkan dalam sosialisasi ini adalah konsep inklusi sosial, urgensi inklusi sosial serta strategi implementasi inklusi sosial di sekolah. Sosialisasi pemahaman inklusi sosial di SMA Negeri 1 Majene disambut antusias oleh Guru – guru. Mereka menilai isu ini terbilang baru di kalangan guru. Setelah menyimak materi yang disajikan oleh tim PkM mereka menyadari pentingnya inklusi sosial. Pendidikan khususnya sekolah menjadi arena yang strategis dalam mereproduksi pemahaman yang inklusif. Dari pemahaman tersebut maka lahirlah praktik keseharian yang inklusif pula. Sebagaimana dugaan tim PkM bahwa di lingkungan pendidikan sekaligus masih banyak yang belum memahami apa itu inklusi sosial. Bahkan tidak jarang sekolah juga menjadi ruang praktik diskriminasi dan bullying atas dasar perbedaan latar tertentu. Oleh karena itu, sekolah sangat penting membangun iklim inklusif agar setiap individu, baik itu guru, staf, dan siswa merasakan sekolah sebagai ruang yang ramah untuk semua.

Kata Kunci: Guru; Inklusi sosial; Strategi implementasi.

Abstract

This service aims to increase teachers' understanding of sosial inclusion issues. The service was held on July 8 2023 at SMA Negeri 1 Majene Regency, West Sulawesi Province. Dozens of teachers from various disciplinary backgrounds took part in this activity. This service is planned, then implemented and evaluated. Increasing the understanding of inclusion is carried out by the socialization method with a two-way model. The material that was revealed in this socialization was the concept of sosial inclusion, the urgency of sosial inclusion and the strategy for implementing sosial inclusion in schools. The dissemination of the understanding of sosial inclusion at SMA Negeri 1 Majene was greeted enthusiastically by the teachers. They considered this issue relatively new among teachers. After listening to the material presented by the PkM team they realized the importance of sosial inclusion. Education, especially schools, is a strategic arena in reproducing inclusive understanding. From this understanding, inclusive daily practices are also born. As suspected by the PkM team, in the educational environment at the same time there are still many who do not understand what sosial inclusion is. Not infrequently, schools also become spaces for discriminatory and bullying practices based on differences in certain backgrounds. Therefore, schools are very important to build an inclusive climate so that every individual, be it teachers, staff, and students feel the school is a friendly space for all.

Keywords: Implementation strategy; Sosial inclusions; Teacher.

How to Cite: Najamuddin, N. et al. (2024). Sosialisasi Pemahaman Inklusi Sosial Bagi Guru di SMA Negeri 1 Majene. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 118-126.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Kebutuhan akan suasana kondusif untuk semua kalangan adalah ihwal mendasar dalam kehidupan sosial. Setiap individu perlu memperoleh penghargaan dengan kondisi berbedanya. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan perangkat nilai, gagasan atau formulasi yang bisa menginterrelasikan keberbedaan antar individu atau komunitas di dalam berinteraksi.

Salah-satu konsep yang sangat relevan untuk menjaga keberagaman adalah inklusi sosial. istilah ini berkembang di Prancis pada tahun 1970, kemudian menyebar ke Negara Eropa khususnya di Inggris. Gagasan ini muncul sebagai akibat keterpurukan kehidupan sosial khususnya pada bidang kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut memantik munculnya upaya pelibatan publik dan perluasan akses layanan kepada masyarakat. Menurut [The Canadian Urban Council Libraries \(2010\)](#) bahwa perwujudan inklusi sosial ketika setiap orang mendapatkan akses secara adil dan berimbang.

Faktanya sikap eksklusifitas masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, tanpa terkecuali di lingkungan sekolah. Bagi [Darma & Rusyidi \(2015\)](#) Sekolah inklusi adalah pendidikan tanpa diskriminasi pada semua kelompok sosial termasuk yang berkebutuhan khusus. Itulah sebanya sekolah mesti menjadi ruang yang paling kondusif untuk tumbuh kembangnya perilaku inklusif terhadap sesama. Sekolah wajib didorong sebagai tempat yang ramah bagi setiap kondisi berbeda, bukan sebaliknya menjadi eksklusif.

Masalah eksklusifitas di dunia pendidikan adalah realitas yang memprihatinkan. Angka perundungan, pelecehan seksual hingga kekerasan masih sering dijumpai. Data kementerian pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 594 kasus kekerasan terhadap anak. Itu adalah angka yang masuk dalam laporan. Tentu masih banyak fenomena semacam ini namun tidak berani dilaporkan.

Kasus di atas terjadi di lingkungan sekolah, dimana jumlah korban sebanyak 717 anak, dengan klasifikasi terdapat 334 korban pada anak laki-laki dan 383 anak perempuan. lebih ironisnya lagi karena 34,7% kasus kekerasan dilakukan oleh guru dan 27,3 % dilakukan oleh teman sekolah ([Direktorat Sekolah Dasar, 2021](#)). Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak mestinya terjadi di lingkungan pendidikan.

Menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah corong dari kampanye *Education for All*, artinya media untuk menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali ([Rusmono, 2020](#)). Namun kenyataannya sekolah seringkali menjadi pemicu pengklasifikasian sosial. Tidak jarang pendidikan melahirkan labelling pada peserta didik tertentu. Misalnya siswa yang pintar adalah mereka yang masuk kelompok belajar IPA. Kelompok belajar IPS adalah second class yang dilabelkan sebagai siswa nakal, bodoh, terbatas dll.

[Bourdieu \(2012\)](#) megaskan bahwa sekolah adalah media yang melanggengkan kelas atas. Pendidikan adalah sarana mereproduksi kelas yang dikuasai oleh mereka yang memiliki modal ekonomi yang cukup. [Foucault \(2016\)](#) Pendidikan modern sebagai media paling ampuh dan halus dalam melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat. Artinya pendidikan adalah struktur yang paling mampu mereproduksi perilaku masyarakat sesuai yang dikehendaki.

Pada dasarnya konsep inklusi sosial sangat relevan diimplementasikan di sekolah. Bagi [Munajah \(2021\)](#) penerapan inklusi sosial di sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas layanan pendidikan. Implementasi sekolah inklusi di dunia pendidikan memiliki banyak kendala dan permasalahan. Sebagaimana [Ni'mah \(2022\)](#) menemukan dalam risetnya bahwa masalah dalam implementasi dunia pendidikan inklusif terdiri dari beberapa aspek, yakni ; aspek peserta didik, aspek kurikulum, aspek tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran. Selain itu permasalahan aspek manajemen sekolah dan sarana pasarana serta peran pemerintah bahkan orang tua adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut [Romadhon \(2021\)](#) bahwa kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi terletak pada kemampuan manajemen kebijakan pendidikan di level sekolah masing-masing. Sedangkan [Gusti \(2021\)](#) menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah karena adanya sosialisasi yang dilakukan pada guru dan orang tua. Selain itu, sekolah juga perlu melakukan modifikasi kurikulum agar bisa mengakomodir peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Menurut [Yuwono \(2021\)](#) pendidikan inklusi bisa diintegrasikan pada proses pembelajaran melalui strategi, media pembelajaran, evaluasi dan lingkungan belajar. Hal tersebut adalah kerja kreatif seorang guru dalam mengkondisikan atmosfer inklusif dalam keseharian pembelajaran. Tentu cara setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda sehingga tidak perlu memaksakan satu strategi untuk menyikapinya. Paling utama adalah adanya kesamaan perspektif dalam memahami bahwa inklusi sosial suatu keharusan dalam lingkungan pendidikan khususnya di sekolah.

Pendidikan inklusi begitu penting bagi anak, sebagai hasil penelitian Dewi (2017) bahwa pendidikan inklusi bisa membuat karakter anak, khususnya dalam menghargai perbedaan. Bukan hanya itu ternyata juga bisa meningkatkan keterampilan sosial khususnya pada interaksinya dengan seseorang yang berbeda. Jika demikian, maka sekolah harus bisa menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Fernandes (2017) keberlangsungan bisa terjamin apabila sekolah bisa menjaga keseimbangan (*equilibrium*) dalam integrasinya dengan system yang ada. Selain itu, kemampuan beradaptasi juga ditentukan oleh integrasi tersebut.

Melihat gambaran kondisi dalam uraian di atas maka dianggap perlu untuk melakukan penyebarluasan informasi tentang pentingnya sekolah menjadi contoh lingkungan yang inklusif bagi semua kalangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberagaman adalah fakta sosial, dimana latar belakang peserta didik, guru dan stakeholder melekat dalam keseharian. Sehingga kesadaran bersama untuk melihat keberbedaan itu sebagai suatu yang biasa tidak perlu dipersoalkan. Apatalagi kalau dianggap sebagai sumber mengeklusi diri dalam interaksi terhadap sesame. Itulah sebabnya sosialisasi ini merupakan langkah penting yang dipilih oleh tim pengabdian untuk merawat kesetaraan (*equity*) di lingkungan sekolah.

Wacana inklusi sosial terbilang baru bagi masyarakat Indonesia. Meskipun di negara eropa sudah berkembang pada beberapa dekade sebelumnya. Keterlambatan wacana ini sebagai sesuatu yang urgen di tengah masyarakat berdampak berimplikasi minimnya pemahaman masyarakat tentang inklusi sosial. Pemahaman inklusi sosial tidak hanya minim pada masyarakat luas tetapi juga berlaku di lingkup pendidikan khususnya sekolah.

Secara substansi marwah pendidikan inklusif bisa ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 Bahwa tugas pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja terminologi ini terlalu umum dan memerlukan interpretasi lebih operasional juga lebih spesifik.

Peraturan terkait pendidikan inklusi baru lahir pada Permendiknas No. 70 tahun 2009. Budiyanto (2005) dalam riset menemukan bahwa Sebenarnya pada tahun 1997 Indonesia melakukan ratifikasi terkait kesepakatan "Salamanca" 1994 terkait pendidikan inklusif. Kemudian di tahun 1998 sampai dengan 2001 Badan penelitian dan pengembangan Kementerian pendidikan dan kebudayaan melaksanakan uji coba pendidikan inklusi pada 7 (tujuh) Sekolah Dasar di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Gunungkidul kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil tersebut tersebut kemudian Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa atau PSLB, dijadikan sebagai pedoman sosialisasi dan praktik implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan diperoleh informasi bahwa dalam lingkungan UPT SMA Negeri 1 Majene masih sering terjadi perkelahian, bulliying, serta perlakuan kekerasan baik antar siswa maupun guru dengan siswa bahkan siswa kepada guru. Kasus yang terjadi berlangsung sejak lama dan masih terulang pada tahun 2023 (Konfirmasi HN sala-satu Guru di SMA Negeri 1 Majene). Kondisi ini merupakan satu indikasi kuat bahwa masih minimnya realisasi praktik inklusif di lingkungan sekolah. Data awal di atas kemudian dipetakan beberapa aspek sebagai masalah sekaligus sasaran Mitra untuk diprioritaskan dalam sosialisasi. Kemudian ditetapkan empat fokus masalah adalah sebagai berikut; (1) Rendahnya pemahaman tentang inklusi sosial, (2) Belum terlaksananya pendidikan inklusi di sekolah, (3) Rendahnya komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, (4) Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung realisasi sekolah inklusif.

Metode Pelaksanaan

Tahap Perencanaan

Pada tahapan ini ketua tim pengabdian kepada masyarakat memilih rencana anggota tim PkM. Kemudian berdiskusi terkait rencana mitra yang menjadi sararan pengabdian. Setelah menentukan mitranya maka melakukan studi review dan observasi (termasuk komunikasi) terkait masalah urgen yang dihadapi oleh mitra. Selain observasi langsung dilakukan wawancara terhadap beberapa unsur meliputi; Kepala sekolah, guru, staf kependidikan dan beberapa siswa. Wawancara dilakukan pedoman pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi keunikan dan keluasan masalah di lapangan. Setelah menemukan masalah, maka dirancanglah proposal pengabdian seseuai panduan terbaru penulisan pengabdian Universitas Negeri Makassar. Setelah proposal rampung dan telah dilakukan finalisasi maka diusulkan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim PkM melakukan komunikasi secara intens kepada pihak mitra untuk membahas persiapan serta penyesuaian teknis pelaksanaan. Setelah melakukan kesepakatan teknis maka dibagi tugas untuk menyiapkan berbagai keperluan selama kegiatan penagbdian. Adapaun keperluan meliputi aspek

administrasi, sarana dan prasarana, pengisi acara, hingga kebutuhan konsumsi. Pada tahapan ini juga tim PkM menyelesaikan bahan/materi yang akan dipresentasikan pada kegiatan nantinya.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan point solusi permasalahan di atas maka tim PkM akan merealisasikan beberapa item berikut ini; (1) Presentasi konsep inklusi sosial bagi guru-guru dan orang tua SMA 1 Negeri Majene, (2) Presentasi urgensi pendidikan inklusif bagi guru-guru SMA 1 Negeri Majene, dan (3) Strategi Implementasi inklusi sosial di SMA 1 Negeri Majene. Secara rinci bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Skema Identifikasi dan Rencana Pemecahan Masalah

Situasi Sekarang (masalah)	Pemberian Perlakuan (pemecahan masalah)	Situasi yang Diinginkan (realisasi pemecahan masalah)
1) Rendahnya pemahaman tentang inklusi sosial	Pemberian pemahaman tentang konsep inklusi sosial	Diharapkan guru memiliki pemahaman yang komperhensif tentang inklusi sosial
2) Masih rendahnya kesadaran terkait pentingnya Inklusi sosial di sekolah	Memberikan pemahaman tentang kesadaran terkait pentingnya Inklusi sosial di sekolah	Diharapkan sekolah bisa lebih paham dan sadar terkait pentingnya Inklusi sosial di sekolah
3) Tidak ada upaya implementasi inklusi sosial di sekolah	Memberikan sosialisasi strategi implementasi inklusi sosial di sekolah	Diharapkan guru dan kepala sekolah berkomitmen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

Proses pelaksanaan sosialisasi sekaligus dilakukan secara bersamaan pendalaman masalah melalui diskusi dua arah. Dari proses diskusi ditemukan kejelasan kondisi sekolah dengan berbagai actor di dalamnya. Guru dan siswa mengakui bahwa mereka masih minim memahami konsep inklusi sosial. Selain itu, praktik kekerasan berupa perkelahian dan bulliyng masih kadang dianggap sebagai sesuatu hal biasa dalam Masyarakat mereka.

Realisasi Pemecahan Masalah

Pengabdian masyarakat yang berjudul sosialisasi pemahaman inklusi sosial bagi guru sudah terlaksana. Kegiatan ini berlangsung pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Majene. Tim pengabdian (selanjutnya disingkat PkM) turun secara lengkap di lokasi. Pemilihan sekolah sebagai mitra berangkat dari beberapa pertimbangan seperti data kasus bulliyng dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah menjadi sasaran strategis yang memungkinkan bisa menerima materi inklusi lebih memungkinkan dibanding kelompok masyarakat lainnya.



Gambar 1. Pembukaan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Majene

Tim berangkat dari kampus tepatnya di halaman gedung Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar pada tanggal 07 juli 2023, tepatnya pukul 08.30 dan tiba pada sore hari di kota majene. Tim PkM

memilih hotel Al Abrar sebagai tempat beristirahat sekaligus menyiapkan perihal teknis yang dibutuhkan di sekolah. Persiapan terbilang mudah karena jauh hari tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.

Sebelum berangkat ke lokasi sosialisasi, terlebih dahulu tim pengabdian berkumpul di aula dinas pendidikan kabupaten mamuju dalam rangka pembukaan. Acara seremoni tersebut langsung dibuka oleh Kepala Dinas Kabupaten Mamuju yakni bapak suardi. Dalam sambutannya beliau sangat berterimakasih pada rombongan tim pengabdian. Selain itu, beliau sangat mengapresiasi, semoga kegiatan pengabdian menjadi satu bentuk kemitraan yang memberikan manfaat bagi guru-guru di kabupaten majene.

Sosialisasi ini menurunkan tiga (3) materi sebagaimana rencana. Adapun materi yang dimaksud yakni, Pengenalan konsep inklusi sosial, Urgensi inklusi sosial dan strategi implementasi inklusi sosial di sekolah. Tiga sub materi tersebut secara bergantian dipandu oleh tim yang juga sebagai narasumber. Materi yang disampaikan sejak pagi hari hingga sore hari. Antusiasme peserta menambah dinamika sosialisasi menjadi forum yang interaktif dan menggairahkan. Hal ini tidak terlepas karena pada umumnya guru masih asing dengan istilah inklusi sosial.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Pertanyaan peserta mulai dari seputaran kejelasan defenisi inklusi sosial, fakta di sekolah dan tantangan yang mereka prediksi. Mereka pada dasarnya sangat menyambut baik isu yang tim angkat. Namun, kurang optimis apakah inklusi sosial bisa diimplementasikan atau tidak. Selain itu, mereka juga lebih banyak menganggap afirmasi siswa yang berkebutuhan khusus sebagai sebuah beban. Hal tersebut dilontarkan oleh bapak Muhammad Sain, S.Pd. pada saat menyampaikan pendapatnya bahwa rencana ini hanya akan menambah beban tambahan bagi guru dan sekolah.

Tim PkM berupaya meyakinkan peserta tentang inklusi sebagai cara pandang. Karena melihat persepsi peserta yang masih sulit menerima tantangan jika berupaya menerapkan inklusi sosial di sekolah. Narasumber sekaligus tim PkM mengeksplorasi lebih jauh bahwa penerimaan sangat ditentukan tingkat pemahaman tentang inklusi itu sendiri. Kita mesti menyadari bahwa realitas yang serba beragam.

Setiap orang mesti mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bertumbuh di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tim PkM berupaya terlibat menyemarakkan isu ini agar bisa memantik kesadaran masyarakat. Kesadaran atas isu ini sangat penting karena menjadi pintu masuk merealisasikan inklusifitas pada semua level khususnya lingkungan sekolah. Setelah peserta sudah mulai memahami inklusi sosial berikut urgensinya, maka selanjutnya tim PkM membahas bagaimana strategi implementasinya dalam lingkungan sekolah. Pada dasarnya semua pihak harus terlibat, mulai dari pimpinan sekolah, guru staf bahkan termasuk di kalangan siswa itu sendiri.

Partisipasi Mitra

Kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan berkat keterlibatan pihak mitra. Sejak awal kegiatan ini direncanakan sudah terlebih dahulu dikomunikasikan pada pihak mitra baik perihal teknis begitu juga topic yang akan di bahas. Kesiadaan pihak mitra adalah hal paling pertama yang mesti disepakati. Kesepakatan dengan pihak mitra ditandai dengan surat kesiadaan pelaksanaan pengabdian yang mereka berikan pada tim. Surat tersebut juga menjadi satu syarat dilanjutkannya kegiatan pengabdian di sasaran yang dimaksud.

Setelah kedua belah pihak sepakat, maka dibahas bersama jadwal dan perihal teknis terkait kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan. Kebutuhan yang dimaksud seperti; Kepesertaan, Perlengkapan ruangan, administrasi dan konsumsi. Peserta yang dijadikan sasaran adalah guru dan staf di sekolah. Mereka adalah unsur strategis yang diharapkan bisa memahami terkait inklusi sosial serta menjadi actor sosial di sekolah dalam mensosialisasikan kepada semua pihak di lingkungan mereka.

Sebagaimana dalam pelaksanaannya, ada puluhan guru yang diutus dalam kegiatan sosialisasi. Guru tersebut dari berbagai latar belakang mata pelajaran (bisa dilihat di lampiran daftar hadir). Selain peserta,

perlengkapan ruangan seperti LCD, Layar dan alat tulis disediakan oleh pihak mitra. Sedangkan spanduk disediakan oleh tim PkM yang dipasang dalam ruangan sebagaimana foto kegiatan terlampir.

Pihak mitra juga memberikan surat keterangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dokumen tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam laporan yang sekaligus menegaskan bahwa tim benar-benar melaksanakan kegiatan PkM di lokasi Mitra. Kebutuhan konsumsi tentu difasilitasi oleh tim pengabdian, meskipun pengolaannya dilakukan oleh pihak mitra, baik konsumsi berat maupun konsumsi ringan.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya kasus kekerasan dengan berbagai bentuk yang terjadi di sekolah sebagaimana diuraikan dari hasil observasi dan wawancara serta pelaksanaan kegiatan maka kegiatan sosialisasi dianggap tindakan tepat untuk menyikapi kondisi tersebut. Dari data yang diperoleh kemudian melahirkan analisis sosial inklusif yang akan diuraikan sebagaimana di bawah ini.

Hasil yang dicapai

Sosialisasi pemahaman inklusi telah dilaksanakan dengan materi yang telah dipersiapkan sebagaimana struktur yang disepakati. Berikut materi berserta capainya sosialisasi pemahaman inklusi sosial bagi di SMA Negeri 1 Majene.

Inklusi Sosial

[Darcy & De Pellegrin \(2016\)](#) mendefinisikan Inklusi sosial sebagai suatu konsep yang merujuk pada upaya dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang perbedaan atau keunikan mereka, diterima, dihargai, dan terlibat sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep inklusi sosial didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan, perlakuan yang adil, dan keterlibatan yang setara dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Inklusi sosial oleh [European Commission \(2019\)](#) mesti melibatkan penghapusan atau pengurangan segala bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan yang mungkin dialami individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengatasi dan mengeliminasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses dan partisipasi individu dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, partisipasi politik, kehidupan komunitas, dan aktivitas sosial.

Pendekatan inklusi sosial menurut [United Nations \(2015\)](#) mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberagaman. Ini melibatkan menciptakan lingkungan yang ramah dan menghormati perbedaan individu serta nilai-nilai yang mereka bawa. Pentingnya inklusi sosial juga terletak pada pengakuan terhadap potensi dan kontribusi yang beragam dari setiap individu dalam mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan.

Melalui inklusi sosial, masyarakat dapat membangun kohesi sosial yang lebih kuat, menciptakan rasa saling ketergantungan yang positif antara individu dan kelompok, dan memperkuat hubungan sosial yang berlandaskan pada keadilan, persamaan, dan saling menghargai. Dengan menerapkan prinsip inklusi sosial, masyarakat dapat menjadi tempat di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, hak, dan peluang, serta untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya hambatan atau diskriminasi ([World Health Organization, 2010](#)).

Urgensi Inklusi sosial

Inklusi sosial di dunia pendidikan memiliki urgensi yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa inklusi sosial menjadi hal yang sangat diperlukan:

1. Pendidikan yang Adil dan Setara: Inklusi sosial memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam konteks inklusi sosial, tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, keturunan, atau kecacatan. Ini menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, setara, dan inklusif.
2. Penghargaan Terhadap Keanekaragaman: Inklusi sosial mengakui dan menghargai keanekaragaman dalam masyarakat. Setiap individu memiliki latar belakang, kepercayaan, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan inklusi sosial, semua individu dihormati dan diterima dengan segala perbedaan yang mereka miliki. Ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan saling menghargai di antara siswa.
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Dalam lingkungan inklusi sosial, siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama teman sebaya mereka yang memiliki perkembangan normal. Ini membantu dalam meningkatkan motivasi, kemandirian, dan rasa percaya diri mereka. Sebagai hasilnya, kualitas pembelajaran bagi semua siswa dapat ditingkatkan melalui interaksi dan kolaborasi yang positif ([UNESCO, 2009](#)).

4. **Persiapan Masyarakat yang Lebih Toleran:** Inklusi sosial di dunia pendidikan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Melalui pengalaman berinteraksi dengan teman sebaya yang beragam, siswa belajar untuk menerima perbedaan, memahami perspektif orang lain, dan membangun kemampuan untuk bekerja sama dalam lingkungan yang heterogen. Ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis (Sharma & Desai, 2002).
5. **Membangun Kemandirian dan Kemampuan Sosial:** Inklusi sosial membantu siswa untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui kolaborasi, siswa belajar untuk memecahkan masalah bersama, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang sehat. Hal ini membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari (Avramidis & Norwich, 2002).

Strategi Implementasi Inklusi sosial di sekolah

Implementasi inklusi sosial di sekolah memerlukan strategi yang tepat agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari lingkungan pendidikan yang inklusif. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Guru:** Guru adalah kunci dalam mengimplementasikan inklusi sosial. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang inklusi sosial, kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, dan teknik pengajaran yang inklusif. Pelatihan yang berkelanjutan dan mendalam tentang inklusi sosial harus diberikan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan (Florian & Hawkins, 2011).
2. **Modifikasi Kurikulum:** Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ini melibatkan penggunaan metode pengajaran yang beragam, sumber belajar yang dapat diakses oleh semua siswa, dan penilaian yang inklusif. Modifikasi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu siswa dan memastikan bahwa kurikulum tidak membatasi akses mereka terhadap pembelajaran (Loreman, Earle, & Sharma, 2007).
3. **Pemilihan dan Pemanfaatan Sumber Daya yang Tepat:** Sekolah perlu memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inklusi sosial. Ini termasuk sumber daya manusia seperti pendukung inklusi, konselor, atau spesialis pendidikan khusus. Selain itu, sumber daya fisik seperti fasilitas yang ramah inklusi, peralatan bantu, dan bahan pembelajaran yang sesuai juga harus tersedia.
4. **Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat:** Inklusi sosial tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka, kolaborasi, dan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan sangat penting. Sekolah juga harus bermitra dengan organisasi lokal, pusat sumber daya, atau lembaga lain yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
5. **Lingkungan Fisik dan Sosial yang Ramah Inklusi:** Sekolah harus menciptakan lingkungan fisik yang ramah inklusi dengan memastikan aksesibilitas yang baik, seperti fasilitas yang dapat diakses oleh siswa dengan mobilitas terbatas. Selain itu, lingkungan sosial yang positif dan mendukung harus dipromosikan, di mana siswa merasa diterima, dihargai, dan diakui atas kontribusi mereka (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006).
6. **Individualisasi Dukungan:** Setiap siswa memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang individual dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini bisa berupa dukungan tambahan dalam bentuk tutor, pendampingan khusus, atau penyesuaian pendukung lainnya yang diperlukan untuk memastikan partisipasi penuh dan sukses siswa di lingkungan inklusif.



Gambar 3. Foto bersama Peserta

Analisis Sosiologi Praktik Inklusi Sosial di Sekolah

Analisis teori Bourdieu (1977) memberikan wawasan yang mendalam tentang inklusi sosial dalam konteks pendidikan. Bourdieu meneliti interaksi kompleks antara struktur sosial, kekuasaan, dan kapital dalam membentuk aksesibilitas dan kesempatan individu di dalam sistem pendidikan. Dalam pandangan Bourdieu, inklusi sosial dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga melibatkan pertanyaan yang lebih luas mengenai kesetaraan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Sala-satu konsep Bourdieu yang relevan yakni Kapital budaya dan capital sosial. Bourdieu & Richardson (1986) menguraikan bahwa kapiial budaya berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki individu, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya mereka. Dalam konteks inklusi sosial di sekolah, kapital budaya memainkan peran penting dalam akses dan partisipasi siswa. Individu yang memiliki kapital budaya yang sesuai dengan apa yang dihargai dan diakui dalam sistem pendidikan cenderung meraih keberhasilan yang lebih besar. Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam akses dan partisipasi pendidikan, dengan individu yang kurang memiliki kapital budaya yang dihargai oleh sistem pendidikan menghadapi hambatan untuk inklusi sosial.

Sedangkan capital sosial Bourdieu & Richardson (1986) merujuk pada hubungan sosial, jaringan, dan sumber daya sosial yang dimiliki oleh individu. Individu yang terlibat dalam jaringan sosial yang kuat dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk inklusi sosial di sekolah. Namun, mereka yang kurang memiliki kapital sosial yang kuat mungkin menghadapi kesulitan dalam akses dan partisipasi yang inklusif.

Dalam mendorong dan menumbuhkan praktik inklusif di lingkungan sekolah maka perlu direncanakan arena yang memungkinkan terjadinya reproduksi sosial. Reproduksi sosial menurut Bourdieu dalam Tamrin et al (2021) mengacu pada proses di mana ketimpangan sosial dan kekuasaan dipertahankan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui institusi sosial, termasuk sistem pendidikan. Bourdieu mengamati adanya mekanisme yang tersembunyi dalam sistem pendidikan yang memungkinkan kelompok yang berada dalam posisi sosial yang lebih tinggi untuk mempertahankan keuntungan mereka. Dalam konteks inklusi sosial, reproduksi sosial dapat menciptakan hambatan struktural bagi individu yang berasal dari latar belakang sosial yang kurang diuntungkan, mempersulit akses mereka ke pendidikan yang inklusif.

Untuk mewujudkan inklusi sosial yang sejati, perlu adanya upaya yang berfokus pada redistribusi kapital budaya dan sosial, serta kesadaran tentang reproduksi sosial yang dapat menghambat akses yang adil dan kesempatan bagi semua individu di dalam sistem pendidikan. Mengakui peran kapital budaya dan sosial serta dampak reproduksi sosial dalam inklusi sosial membantu kita memahami tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mencapai lingkungan pendidikan yang lebih inklusif (Breen & Jonsson, 2005).

Kesimpulan

Sosialisasi pemahaman inklusi sosial di SMA Negeri 1 Majene disambut antusias oleh Guru – guru. Mereka menilai isu ini terbilang baru di kalangan guru. Setelah menyimak materi yang disajikan oleh tim PkM mereka menyadari pentingnya inklusi sosial. Pendidikan khususnya sekolah menjadi arena yang strategis dalam mereproduksi pemahaman yang inklusif. Dari pemahaman tersebut maka lahirlah praktik keseharian yang inklusif pula. Sebagaimana dugaan tim PkM bahwa di lingkungan pendidikan sekaligus masih banyak yang belum memahami apa itu inklusi sosial. Bahkan tidak jarang sekolah juga menjadi ruang praktik diskriminasi dan bullying atas dasar perbedaan latar tertentu. Oleh karena itu, sekolah sangat penting membangun iklim inklusif agar setiap individu, baik itu guru, staf, dan siswa merasakan sekolah sebagai ruang yang ramah untuk semua. Oleh karena itu, perlu penguatan dari aspek regulasi agar gerakan ini bisa lebih massif dan terstruktur.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
- Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. *European Journal of Special Needs Education, 17*(2), 129–147.
- Bourdieu, P. (1977). *Cultural reproduction and sosial reproduction*. In J. Karabel & A. H. Halsey (Eds.), *Power and ideology in education*. Oxford University Press.
- Bourdieu, P., & Richardson, J. G. (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. *The Forms of Capital, 241, 258*.
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on

-
- educational attainment and sosial mobility. *Annu. Rev. Sociol.*, 31, 223–243.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Dewi, N. K. (2017). Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12–19.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2021). Bentuk Kekerasan Anak di Sekolah. Retrieved February 2, 2023, from <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya#:~:text=Untuk di satuan pendidikan%2C berdasarkan,334 dan anak perempuan 383>.
- Fernandes, R. (2017). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119–125.
- Florian, L., & Black Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828.
- Foucault, M. (2016). *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LkiS.
- Gusti, N. S. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 532–544.
- Loreman, T., Earle, C., & Sharma, U. (2007). Student outcomes in inclusive education settings. *Exceptionality Education International*, 17(2), 91–112.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Ni'mah, N. U., Istirohmah, A. N., Hamidaturrohmah, H., & Widiyono, A. (2022). Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Journal on Teacher Education*, 3(3), 345–353.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan pendidikan inklusi sebuah solusi di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115.
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah: literature review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209–217.
- Sharma, U., & Desai, I. (2002). An Inclusive Approach to Education: Increasing Classroom Participation of Students with Disabilities. *International Journal of Special Education*, 17(2), 21–26.
- Tamrin, S., Irwansyah, I., Mario, M., & Arisnawawi, A. (2021). Terrorism Habitus Reproduction In Indonesia (Study Of Pierre Bordieu's Thought In Potraying Terror Behavior In Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 10(2), 130–138.
- The Canadian Urban Council Libraries. (2010). Sosial Inclusion Audit. <https://culc.ca/research/social-inclusion-audit/>
- UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Retrieved July 10, 2023, from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180176>
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020.
-